



Menolak Uang Kompensasi dari PT KAI

Warga Lempuyangan Tak Mau Direlokasi, Desak Mediasi Ulang

JOGJA - Pertemuan terkait musyawarah penyampaian ongkos bongkar yang dilakukan antara PT Kereta Api Indonesia (KAI), Keraton Jogja dan warga Lempuyangan berlangsung secara tertutup. Pertemuan sekitar satu setengah jam tersebut berakhir *deadlock* karena warga masih menolak relokasi dan saling menunggu tindak lanjut berikutnya.

Pertemuan diselenggarakan di Kantor Kalurahan, Bausasran, Danurejan, Kota Jogja, kemarin (15/5). Tamu undangan yang hadir mulai memasuki kantor sekitar pukul 09.30. Setelah itu, dua gerbang besi jalur akses masuk ke gedung yang notabene merupakan kantor pelayanan publik digembok rapat. Seseorang yang berada di dalam mengatakan, pertemuan dilakukan tertutup dan awak media dilarang masuk.

"Dilarang masuk selain undangan, bisa ditunggu di depan," ujar seseorang yang berada di balik pagar Kantor Kelurahan Bausasran.

Peserta musyawarah ada sekitar 20 orang dari warga Lempuyangan, beberapa orang perwakilan PT KAI, dua perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogjakarta dan satu orang perwakilan dari Keraton Jogja. Mereka mulai keluar kantor sekitar pukul 10.30.

"Agenda tadi terkait (sosialisasi) kompensasi yang akan disampaikan PT KAI," ujar Staf Divisi Advokasi LBH Jogjakarta Muhammad Rakha Ramadani saat ditemui pascapertemuan, kemarin (15/5).

Menurutnya, dari pertemuan tersebut belum ditemukan hasil atau dikatakan *deadlock*. Namun, sikap warga tegas menolak untuk direlokasi dan meminta diadakan mediasi lanjutan di ruang-ruang alternatif.

"Hasil (pertemuan) tadi setidaknya ada jawaban dari secara tertulis terlebih dahulu (dari PT KAI)," tuturnya.

PT KAI dalam pertemuan itu menjanjikan adanya kompensasi bagi warga terdampak. Kisaran biaya kompensasi yang ditawarkan bervariasi, tergantung pada kondisi dan luas bangunan di luar bangunan induk. "Kalau kisaran tadi variatif dari Rp 55-120 juta," bebernya.



TOLAK: Sejumlah warga Lempuyangan yang terdampak rencana pengembangan Stasiun Lempuyangan tak mau terima uang kompensasi sesuai mengikuti audiensi, di Kantor Kalurahan Bausasran, kemarin (15/5).

Agenda sosialisasi itu dinilai tidak menghargai proses mediasi yang sedang difasilitasi Keraton Jogja, DPRD DIJ maupun DPRD Kota Jogja. Dalam hal ini, warga tidak serta merta ingin membicarakan terkait kompensasi, melainkan pada aspek hak atas tempat tinggal yang layak bagi masyarakat. "Tidak serta merta membu-

at agenda sendiri. Kami dan KAI kan saling bersengketa, kami butuh ruang tengah," jelasnya.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), warga berharap PT KAI dapat menjadi representasi negara dalam menjamin aspek hak atas tempat tinggal layak. Mereka juga mempertanyakan terkait dasar

PT KAI yang mengklaim hak atas 14 bangunan yang ditempati warga tersebut.

"Pihak keraton lebih menjelaskan terkait penguasaan tanah dan adanya bebungah yang rencananya diberikan kepada warga," jelasnya. Bebungah dapat diartikan sebagai hadiah atau bentuk kompensasi. Namun besarnya

belum diketahui.

Perwakilan Kewedanan Heng Punakawan (KHP) Datu Dana Suyasa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Agus Langgeng Basuki memilih irit bicara saat ditemui awak media. Ia malah menyarankan untuk wawancara ke narasumber lain selain dirinya.

"Mohon maaf karena saya ditugasi dengan kewenangan terbatas, termasuk diminta untuk menyampaikan ke pihak lain, panjengnenan ke sumber yang lain aja lah," ujarnya.

"Karena saya tidak diberi kewenangan, nanti *ndak* malah tidak pas," lanjutnya.

Manager Humas KAI Manager Humas KAI Daop 6 Jogjakarta Feni Novida Saragih yang terlihat keluar bersama rombongan perwakilan PT KAI juga tak berkomentar banyak.

Sambil terlihat terburu-buru ia menyampaikan telah menerima aspirasi dan masukan warga dalam pertemuan tersebut. "Akan menjadi pembahasan internal untuk langkah selanjutnya," ujarnya.

Pertemuan tersebut diakui merupakan tindak lanjut dari sosialisasi rencana relokasi warga sekitar Stasiun Lempuyangan. Sosialisasi tersebut di-

antaranya membahas tentang kompensasi.

"Karena bahasanya sudah menolak, maka kami akan bahas di internal untuk langkah apa yang akan kami ambil. Itu dulu yang bisa kami sampaikan," jelasnya.

Salah satu warga terdampak, Anik Sunarjo mengatakan, alasan menolak pindah karena dirinya sejak kecil hidup di lokasi tersebut. Rencana pemindahan tersebut juga dinilai mendadak. "Rumah tinggal itu menyatu dengan kami, hati kami ada disana," bebernya.

Ia menceritakan kisah saat tragedi gempa bumi Jogja 2006, di mana rumah yang mereka tinggali secara fisik ada kerusakannya. Salah satunya bagian cerobong asap yang menempel di beberapa bangunan miring ke belakang dan membahayakan warga. "Kalau ini diklaim aset KAI, kenapa waktu gempa tidak ada tindak lanjut," tegasnya.

Karena membahayakan dan tidak ada bantuan dari PT KAI, mereka selanjutnya melakukan renovasi mandiri tanpa bantuan pihak PT KAI sedikitpun. "Satu rupiah pun tidak ada (bantuan)," tandasnya. (oso/wia/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005